

WARTA

Bukhori Yusuf: Terkait Penyelenggaraan Haji, Kemenag Jangan Sendirian Negosiasi ke Saudi

Updates. - WARTA.CO.ID

Sep 1, 2022 - 16:44



Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI [Bukhori Yusuf](#) meminta Kementerian

Agama (Kemenag) meningkatkan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah [haji](#). Palsalnya, menurut Bukhori, Pemerintah Arab Saudi secara serta-merta menetapkan harga masyair yang tidak masuk akal. Terlebih, meski harga masyair itu naik signifikan, fasilitas yang diberikan oleh pihak Saudi tidak sesuai dengan tingginya harga tersebut.

"Saya heran, kenapa ketika Pemerintah Saudi menetapkan harga masyair yang tidak masuk akal itu, tidak melalui negosiasi. Walaupun hanya diberi waktu beberapa hari, jangankan jarak 3 hari, 1 hari pun harus mampu menegosiasi, karena Kemenag telah mengurus masalah [haji](#) berpuluh-puluh tahun. Artinya pasti sudah sangat expert di berbagai aspek dalam urusan [haji](#)," kata Bukhori dalam keterangan persnya, baru-baru ini.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-[PKS](#)) itu menyebutkan, semula harga masyair 1.400 riyal kemudian tiba-tiba naik menjadi 6.400 riyal. Menurutnya, ini jelas bukan kenaikan harga melainkan penetapan harga baru. "Persoalannya sebetulnya bukan di rasional atau tidak rasional harga itu, tetapi adalah kemampuan negosiasi. Jadi harus mencari negotiable yang baik dalam konteks ini," ujar Bukhori.

Saudi, lanjut Bukhori, adalah penyedia layanan [haji](#) dan [Indonesia](#) adalah pengguna layanannya. Karena hubungan inilah, pengguna dan penyedia sudah sewajarnya melakukan negosiasi. "Ini dunia sudah terbuka. Ini perdagangan. Kalau perdagangan, enggak ada kaitan dengan ibadah. Ibadah kan prosesnya. Sedangkan tempat, wukuf, tenda, itu kan perdagangan semua. Karena itu, harus negotiable," tambahnya.

Bukhori menyarankan Kemenag untuk tidak sendirian dalam melakukan negosiasi dengan Saudi, terutama soal harga masyair itu. Menurutnya, pemerintah RI perlu melibatkan negara-negara Muslim lain demi mendapatkan harga yang rasional. "Kalau negosiasi, jangan sendiri, libatkan banyak negara Muslim lainnya, seperti Turki, Pakistan, sehingga mendapatkan hasil yang masuk akal," ucap legislator dapil [Jawa Tengah](#) I itu.

Kemenag, terang Bukhori, juga harus melakukan efisiensi sejak awal dengan pola perencanaan yang lebih baik dan antisipatif. Dia menekankan, perlu ada pembaruan dalam perencanaan agar mampu mengantisipasi berbagai perkembangan. Ia menilai, penyelenggaraan [haji](#) 2022 menunjukkan pemerintah kurang siap karena perencanaannya tidak berbasis pada situasi berkembang. Selain itu, Bukhori mengingatkan supaya setelah selesai penyelenggaraan, dana efisiensi itu harus langsung disetor ke BPKH.

"Jadi tidak menunggu audit BPK. Audit BPK itu digunakan sebagai pola

perencanaan yang akan datang, bukan sekarang," jelasnya. (rnm/sf)